BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

a. **Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Penum**

Pengelolaan ADD di Desa Penum telah dilakukan secara sistematis dan transparan dengan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan dana masih menjadi kendala, sehingga efisiensi pengelolaan dan komunikasi perlu ditingkatkan.

b. **Kinerja dan Kehadiran Aparatur Desa dalam Pengelolaan ADD**

Kinerja aparatur desa masih kurang optimal, terutama dalam transparansi informasi, efektivitas layanan, dan kesejahteraan pegawai. Meskipun demikian, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah berjalan cukup baik.

c. **Pengelolaan ADD dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan ADD masih terkendala kesejahteraan yang rendah, namun telah berusaha menerapkan prinsip ekonomi Islam, yaitu: Prinsip Tauhid: Kebijakan dijalankan dengan transparansi dan tanpa kemudharatan., Prinsip Keadilan: Pelayanan diberikan secara adil dan sesuai aturan., Masalah: Penggunaan ADD berorientasi pada kemanfaatan masyarakat., dan Khalifah: Pengelolaan dana desa dilakukan dengan tanggung jawab dan Amanah.

1.2 Saran

1. Untuk Aparatur Desa:
 - a. Pasang baliho di tempat strategis dengan rincian anggaran ADD.
 - b. Perkuat pengawasan BPD agar ada kontrol sosial.
 - c. Tingkatkan tunjangan aparatur desa melalui sumber pendapatan alternatif seperti BUMDes.
 - d. Pastikan pelayanan administrasi dilakukan di kantor desa dengan jam operasional yang jelas.
 - e. Adakan pelatihan rutin terkait manajemen keuangan dan administrasi.
2. Untuk Masyarakat:
 1. Berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi ADD.
 2. Gunakan jalur resmi seperti BPD untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pengelolaan dana.
 3. Menjaga hasil pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
3. Untuk Penelitian dan Evaluasi:
 - a. Lakukan kajian berkala terkait efektivitas penggunaan ADD.
 - b. Evaluasi transparansi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - c. Gunakan hasil penelitian sebagai dasar perbaikan kebijakan desa.